

## CITRA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2023

6

Marfuatul Latifah\*

### Abstrak

*Tahun 2023 diwarnai berbagai kasus hukum, baik yang melibatkan pejabat publik maupun penegakan hukum yang tidak efektif sehingga masyarakat Indonesia sulit untuk mendapatkan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk membahas citra penegakan hukum di Indonesia sebagai kajian akhir tahun untuk memberikan gambaran langkah yang harus ditempuh eksekutif dan legislatif. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2023 mengalami stagnasi. Masyarakat belum sepenuhnya menganggap bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik pada tahun 2023. Menyikapi hal tersebut, pihak eksekutif harus segera menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Menkopolhukam. Komisi III DPR RI dapat melanjutkan kinerja Panitia Kerja Pengawasan terhadap penegakan hukum yang agenda kerjanya disesuaikan dengan keberadaan Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum. Pengawasan dari DPR RI berperan untuk menjamin warga negara Indonesia mendapatkan keadilan dan mendapatkan perlindungan dari negara akibat dampak dari penegakan hukum yang buruk.*

### Pendahuluan

Pada 5 Desember 2023 Firli Bahuri (FB), Ketua KPK nonaktif, memenuhi panggilan pemeriksaan Dewan Pengawas KPK terkait dengan dugaan pelanggaran etik atas pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI (Bareskrim Polri) telah menetapkan

FB sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan SYL pada 22 November 2023. Proses penegakan hukum terhadap FB menambah daftar panjang pejabat publik yang terlibat kasus hukum sepanjang tahun 2023. Pada saat hampir bersamaan, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Kemudian, SYL mantan Menteri Pertanian RI yang



9 772088 235001

\* Analisis legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: marfuatul.latifa@dpr.go.id.

menjadi tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate, dan Achsanul Qosasi Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan juga menjadi tersangka dalam kasus hukum pada tahun 2023.

Tidak hanya perkara yang berkaitan dengan pejabat publik, penegakan hukum pada tahun 2023 juga diwarnai dengan berbagai peristiwa di masyarakat yang memperburuk citra penegakan hukum. Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta menyatakan bahwa pengaduan masyarakat pada Komisi III DPR RI banyak seputar penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, penanganan perkara yang tidak transparan dan tidak responsif, masih adanya “peti es” kasus, dan adanya intervensi di sektor penegakan hukum dan peradilan ([dpr.go.id](http://dpr.go.id), 27 November 2023). Bahkan masyarakat merespons kondisi tersebut dengan fenomena #noviralnojustice dan #percumalaporpolisi di media sosial pada pertengahan 2023. Fenomena tersebut menjadi strategi bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Denny Indrayana menyatakan fenomena tersebut muncul karena banyak kasus hukum yang tidak mendapatkan keadilan jika tidak menjadi perhatian publik ([detik.com](http://detik.com), 3 Juli 2023). Berbagai peristiwa tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai citra penegakan hukum di Indonesia dan langkah yang harus ditempuh untuk memperbaiki citra penegakan

hukum di Indonesia. Pembahasan mengenai citra penegakan hukum sangat menarik sebagai kajian akhir tahun dengan tujuan untuk perbaikan penegakan hukum pada masa yang akan datang.

## Citra Penegakan Hukum di Masyarakat

Upaya untuk menilai citra penegakan hukum dapat dilakukan dengan melihat pada berbagai survei/kajian yang diselenggarakan oleh lembaga independen. Pada tanggal 25 Oktober 2023, World Justice Project menerbitkan Indeks Negara Hukum tahun 2023, skor Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2023 adalah 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi), atau sama dengan skor tahun 2022. Stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia merupakan sesuatu yang memprihatinkan sebab sudah terjadi sejak tahun 2015 hingga 2023, dimana skor Indonesia konsisten di angka 0.52-0.53. Laode M Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan menyatakan bahwa stagnasi ini menempatkan Indonesia sebagai negara hukum dengan rapor merah ([kemitraan.or.id](http://kemitraan.or.id), 25 Oktober 2023).

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaksanakan survei pada 16-18 Oktober 2023. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa 36,1% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk. Sementara responden yang menilai baik sebesar 28,1%. Terdapat responden yang menjawab sedang sebesar 29,1%, sedangkan yang menjawab buruk sebanyak 29%, dan tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ) sebanyak 6,7% ([databooks.katadata.com](http://databooks.katadata.com), 24 Oktober 2023).

Lembaga survei Indopol merilis hasil survei terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia pada periode 6-12 November 2023. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa 49,68% responden yang menilai kondisi penyelenggaraan hukum di Indonesia baik. Sedangkan 41,77% responden menyatakan kondisi penyelenggaraan hukum saat ini buruk, dengan rincian 35,00% responden menyatakan buruk dan 6,77% sangat buruk (news.detik.com, 27 November 2023).

Berdasarkan ketiga hasil survei/kajian tersebut, meskipun terdapat stagnasi penilaian negara hukum terhadap Indonesia sejak 2015-2023, namun persepsi masyarakat masih terbelah menyikapi kondisi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penilaian persepsi penegakan hukum yang hampir seimbang dari Indopol, yaitu 49,68% baik dan 41,77% buruk dan hasil Survei LSI menyatakan persepsi masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum merata, yaitu buruk 36,1%, sedang 29,1%, baik 28,1%, dan tidak menjawab 6,7%. Realitas ini menunjukkan pandangan masyarakat terbelah menyikapi praktik penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2023. Kondisi ini dapat disikapi oleh setiap pemangku kepentingan berdasarkan kewenangannya masing-masing sehingga citra penegakan hukum mengalami peningkatan pada masa yang akan datang.

### **Langkah yang Harus Ditempuh**

Perbaikan citra penegakan hukum di Indonesia tidak dapat diperbaiki oleh eksekutif saja. DPR RI selaku perwakilan rakyat

berperan melakukan *check and balances* agar perbaikan citra penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan di masyarakat dapat segera dilaksanakan. Upaya perbaikan citra penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan secara simultan antara pihak eksekutif dan legislatif agar perbaikan atas praktik penegakan hukum pada masa yang akan datang dapat segera terwujud. Pada 12 September 2023, Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Menkopolkam, telah menyampaikan berbagai rekomendasi jangka pendek dan menengah kepada Presiden untuk mempercepat perbaikan lembaga peradilan dan penegakan hukum, anti korupsi, serta peraturan perundang-undangan.

Tim menghasilkan puluhan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum. Puluhan rekomendasi tersebut dibagi menjadi empat Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum, Pokja Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pokja Sektor Perundang-undangan (polkam.go.id, 12 September 2023). Laode Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan, menyatakan bahwa jika pemerintah menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum maka secara bertahap perbaikan pembangunan hukum di Indonesia akan dicapai. Perbaikan ini juga akan meningkatkan Indeks Negara Hukum Indonesia pada masa yang akan datang (kemitraan.or.id).

DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan untuk

memastikan pelaksanaan program percepatan reformasi hukum dapat segera diselesaikan. Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum dapat melanjutkan Panitia Kerja Pengawasan terhadap penegakan hukum yang selama ini sudah terbentuk di Komisi III DPR RI. Agenda kerja dalam Panja Pengawasan Penegakan Hukum dapat disesuaikan dengan keberadaan Pokja Tim Percepatan Reformasi Hukum. Pengawasan DPR RI sangat penting, tidak hanya untuk memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia, pengawasan DPR RI juga berperan untuk menjamin warga negara Indonesia mendapatkan keadilan dan mendapatkan perlindungan dari negara akibat dampak dari penegakan hukum yang buruk.

## Penutup

Kasus yang menimpa Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, dan Mantan Menteri Pertanian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahun 2023 diwarnai dengan berbagai peristiwa di masyarakat yang berpotensi memperburuk citra penegakan hukum. Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2023 mengalami stagnasi dengan indeks yang didapatkan pada tahun 2022. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2015. Meskipun demikian, hasil survei LSI dan Indopol membuktikan bahwa masyarakat masih terbelah dalam menyikapi kondisi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa citra penegakan hukum di berita media massa, tidak sama dengan persepsi masyarakat

terhadap penegakan hukum di tahun 2023, karena masyarakat tidak sepenuhnya menilai penegakan hukum buruk meskipun banyak berita terkait dengan pejabat publik yang terkena kasus hukum. Pihak eksekutif dan legislatif harus melakukan upaya yang simultan dalam memperbaiki penegakan hukum pada masa yang akan datang, yaitu pihak eksekutif menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum dan Komisi III DPR RI harus memastikan pemerintah menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum melalui penyelenggaraan Panja Pengawasan Penegakan Hukum.

## Referensi

- “Achsarul Qosasi Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Menara BTS Kominfo BPK Didesak Berbenah”, *bbc.com*, 3 November 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw9vy4j5v8xo>, diakses 5 Desember 2023.
- “Kinerja Sistem dan SDM Sektor Hukum Masih Memerlukan Perbaikan”, *dpr.go.id*, 27 November 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47771/t/Hukum+di+Indonesia+Memerlukan+Reformasi+Secara+Signifikan>, diakses 5 Desember 2023.
- “Lobang Hitam "No Viral No Justice", *detik.com*, 3 Juli 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6803418/lobang-hitam-no-viral-no-justice>, diakses 5 Desember 2023.

“Menko Polhukam: Tim Percepatan Reformasi Hukum Rampungkan Tugas, Segera Laporkan ke Presiden”, polkam.go.id, 12 September 2023, <https://polkam.go.id/menko-polhukam-tim-percepatan-reformasi-hukum-rampungkan-tugas-segera-laporkan-ke-presiden/>, diakses 6 Desember 2023.

“Proporsi Persepsi Responden atas Penegakan Hukum di Indonesia (16-18 Oktober 2023)”, databoks.katadata.co.id, 24 Oktober 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/24/banyak-orang-yang-menilai-penegakan-hukum-ri-buruk-pada-oktober-2023>, diakses 5 Desember 2023.

“Stagnasi Rapor Merah Negara Hukum Indonesia: Catatan atas Rule of Law Index Tahun 2023- World Justice Project”, kemitraan.or.id, 25 Oktober 2023, <https://kemitraan.or.id/press-release/stagnasi-rapor-merah-negara-hukum-indonesia-catatan-atas-rule-of-law-index-tahun-2023-world-justice-project/>, diakses 5 Desember 2023.

“Survei Indopol: 49,68% Nilai Kondisi Hukum RI Baik, 41,77% Anggap Buruk”, news.detik.com, 27 November 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-7059472/survei-indopol-49-68-nilai-kondisi-hukum-ri-baik-41-77-anggap-buruk>, diakses 5 Desember 2023.